

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN
KELUARGA DI DESA PARARRA KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

HANIS

14.16.4.0036

Dibimbing Oleh,

1. **Zainuddin S, S.E., M.Ak**
2. **Dr. Mustaming, S.Ag., MA.**
- 3.

**JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM (FEBI) INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO 2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Pengertian Pemberdayaan	10
C. Pengertian Pemberdayaan Perempuan	10
D. Realita Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia.....	12
E. Model Pemberdayaan Perempuan	16
F. Dasar dan Tujuan Program Keluarga Harapan.....	26
G. Ketentuan Peserta Keluarga Harapan (PKH)	28
H. Kewajiban Peserta PKH	28
I. Pendapatan Keluarga	30
J. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Informan/ Subyek Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

HANIS, 2018 : Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Pendapatan keluarga di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh (Pembimbing I) Zainuddin S, S.E., M.AK. dan (Pembimbing II) Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Pendapatan

Skripsi ini membahas tentang pemberdayaan perempuan melalui program keluarga harapan (PKH) guna meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Adapaun latar belakang dalam penelitian ini yaitu tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih rendah, Rendahnya tingkat partisipasi tersebut disebabkan keterbatasan pemberdayaan yang dihadapi oleh perempuan, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana meningkatkan pendapatan keluarga melalui bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris dan sosiologi histori yaitu cara mendekati suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan lebih mementingkan pola-pola hubungan dalam kehidupan sosial. Dengan menggunakan tehknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah ibu-ibu di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang mendapatkan bantuan dana program keluarga harapan (PKH).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ibu ibu melalui program keluarga harapan (PKH) sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga, terutama bagi ibu-ibu yang mengelola dana PKH tersebut. Namun dari 8 ibu-ibu yang mendapatkan bantuan dana PKH hanya 3 orang saja yang mengelolahnya melalui usaha kecil-kecilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 118,010,413 jiwa. Jumlahnya yang banyak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan, namun jika tidak didukung dengan kualitas maka penduduk perempuan hanya akan menjadi beban suatu negara. Dalam kehidupan nyata seringkali perempuan kurang mampu berperan aktif dalam ekonomi keluarga, sehingga perempuan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bergantung dengan hasil pendapatan suami. Pekerjaan perempuan dalam rumah tangga menyebabkan perempuan dianggap sebagai penerima pasif pembangunan. Berdasarkan sumber data World Bank tahun 2007 yang telah diolah kembali, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia 51,7% dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 88,5. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih rendah dibanding tingkat partisipasi kerja laki-laki.¹

Rendahnya tingkat partisipasi tersebut disebabkan keterbatasan pemberdayaan yang dihadapi oleh perempuan seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, keterampilan dan pendidikan yang rendah, hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah

¹ Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 3

tangga serta kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “*triple burden of women*”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Kurangnya pemberdayaan tersebut menyebabkan perempuan tidak dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam menangani masalah ekonomi.² Menurut Riant Nugroho, berbagai upaya dan usaha telah dilakukan pemerintah sejak 1978 untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, kemajuan dan keberhasilan tersebut belum dapat mengenai secara merata pada sebagian besar perempuan, terlebih pada perempuan perdesaan yang mengalami berbagai ketertinggalan.³

Bila keadaan tersebut terus berlanjut maka perempuan yang jumlahnya lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia dapat menjadi beban pembangunan dan bukan sebagai sumber daya pembangunan yang berpotensi. Untuk dapat melibatkan perempuan yang secara kualitas masih rendah diperlukan sebuah upaya yang nyata dan berkesinambungan salah satunya yaitu dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Menurut Sulistiyani, pemberdayaan berasal dari kata “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam konteks pembangunan nasional, pemberdayaan perempuan berarti upaya menumbuh kembangkan

² Skarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung Pustaka Seti, 2013) h.29

³ *Ibid*, h. 31

potensi dan peran perempuan dalam semua dimensi kehidupan Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, pemerintahan, Negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan, Politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Pemberdayaan itu sendiri mengandung tiga kekuatan di dalam dirinya, yakni kekuatan untuk berbuat, kekuatan untuk membangun kerjasama dan kekuatan dalam diri pribadi manusia. Sebagai diketahui strategi dan upaya pemberdayaan perempuan pada khususnya dan pemberdayaan manusia pada umumnya, adalah salah satu topik yang paling mendapat perhatian berbagai kalangan akhir-akhir ini. Haryono Suyono, mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan sering pula disebut sebagai peningkatan kualitas hidup personal perempuan, yaitu suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi, atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya.⁴

Sejalan dengan itu, langkah strategis yang perlu di lancarkan dalam kerja pemberdayaan perempuan adalah memberikan dukungan yang menjadikan setiap perempuan sebagai fokus perhatian dan arena pengabdian. Khusus kepada kaum ibu, yang mendesak untuk segera dilakukan adalah meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap dan berkesinambungan agar bisa mengola dan bergelut dengan kesempatan yang terbuka di dalam lingkungannya sendiri.

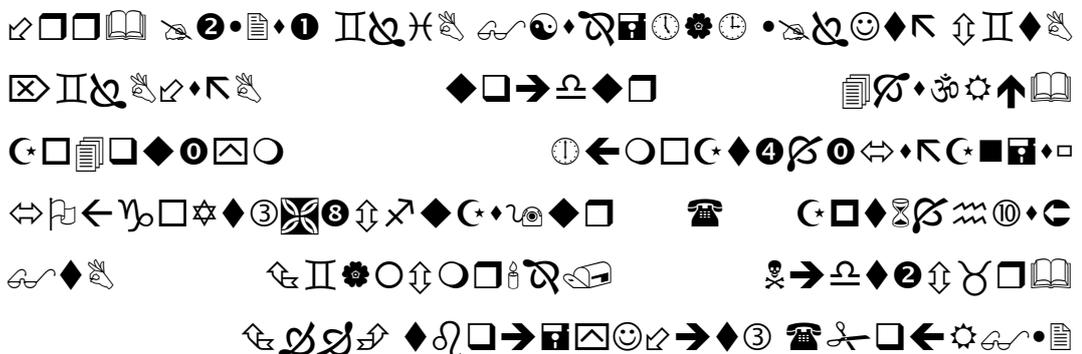
⁴ Skarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung Pustaka Seti, 2013) h.29

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan SDM serta sistem jaminan sosial, mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan ekonomi dan kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH merupakan salah satu bentuk pemberdayaan pendidikan ekonomi dan kesehatan yang dirancang untuk membantu para wanita pada sisi beban pengeluaran khususnya terkait dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk jangka pendek dan memperbaiki pola pikir serta mengubah perilaku serta SDMnya agar mampu mengembangkan segala potensi melalui pemberdayaan yang telah diprogram Pemerintah melalui PKH.⁵

“Program pemberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga akan mampu menjadi “pintu masuk menuju perbaikan kesejahteraan keluarga” (Sunyoto Usman, 2004). Berkaitan dengan perbaikan kesejahteraan keluarga maka telah menuntut perempuan untuk dapat menopang ketahanan ekonomi keluarga. Kondisi demikian merupakan dorongan yang kuat bagi perempuan untuk berkerja dalam menambah penghasilan, Seperti halnya program pemberdayaan masyarakat melalui PKH (Program Keluarga Harapan) yang telah dilakukan di Dusun Sangkale, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

⁵ Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Daerah* (Jakarta : Kementerian Sosial RI, 2011), h.1

Program pemberdayaan melalui PKH ini lebih ditekankan untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada subjek perempuan, karena dalam kenyataannya perempuan di desa sering mengalami ketertinggalan baik di bidang ekonomi maupun pendidikan dari pada perempuan di kota. Dalam Islam menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Kesalahan aktifitas perempuan diarahkan. Pemberdayaan perempuan ini didasarkan pada visi menjadi perempuan unggul sebagai *ummun warobbatul bait* sebagai mitra laki-laki demi melahirkan generasi cerdas, takwa, pejuang syariah, dan khafilah, dan kesakinahan keluarga. Sementara misinya adalah: mengokohkan ketahanan keluarga muslim, melahirkan generasi pejuang, membangun muslimah berkarakter, kuat dalam rangka amal, makruf, nahi, munkar, melahirkan perempuan sebagai mitra laki-laki dalam rumah tangga dan perjuangan di masyarakat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl : 97 sebagai berikut:



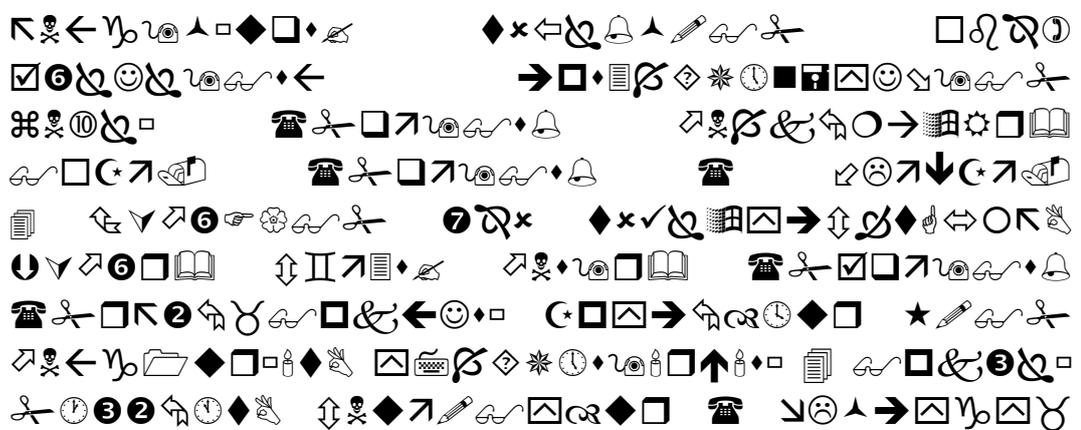
Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁶

Dalam penjelasan yang sudah penulis jabarkan diatas, maka peneliti akan meneliti tentang **“Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”** agar mampu memberikan manfaat kepada keluarganya, bukan hanya untuk keluarganya saja. Tapi dalam lingkungan masyarakat mampu menerima manfaatnya dari pemberdayaan melalui PKH tersebut.

Pada umumnya yang berperan sebagai penopang kehidupan keluarga adalah suami, hal ini tentunya sebagai perwujudan bahwa laki-laki berada diatas perempuan sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An – Nisa (16) Ayat

97



⁶ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama, Syaamil Qur'an, Bandung, 200. Ayat 97



Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri”.⁷

Dengan adanya pemberdayaan tersebut maka diharapkan perempuan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dan dapat terlibat secara aktif dalam peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, bentuk pemberdayaan yang diberikan harus mampu membantu perempuan dalam memperoleh pelatihan dan pendidikan jangka pendek untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Meningkatkan pendapatan keluarga melalui bantuan dana program keluarga harapan (PKH) di Desa pararra Kecamatan sabbang kabupaten Luwu Utara.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki kaum perempuan melalui program pemberdayaan PKH guna meningkatkan

⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Syaamil Qur'an, Bandung, 200. Ayat 34

pendapatan masyarakat di dusun Sangkale Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

2. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1). Sebagai pembanding antara teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan.

2). Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang serupa.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi penyusun, Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemberdayaan kaum perempuan melalui PKH di dusun Sangkale Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

2). Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan pada sumber informasi bagi penulisan lainnya yang dilakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.

D. Defenisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang diteliti, maka perlu diberikan defenisi operasional variabel dan ruang lingkup penelitian. Dimana defenisi operasional variabel dalam penelitian ini menyangkut tentang masalah pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Adapun variabel variabelnya yaitu :

1. Pemberdayaan perempuan dalam melakukan kegiatan yang sesuai dengan

nilai dan norma dalam masyarakat, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja.

2. Pendapatan ekonomi keluarga yaitu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan terhadap suatu benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu di Desa Pararra Kec.Sabbang kab.Luwu Utara. Desa Pararra terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Pararra, Dusun Sangkale, Dusun Rante Takoa, Dusun Lena, dan Dusun Saluturunan. Terkhusus dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya di Dusun Sangkale.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Tri Ramadhan, dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta utara” Skripsi ini membahas tentang bagaimana model model implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara, juga membahas faktor faktor yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasi PKH .
2. Ahmad Rokhoul Alamin, dengan skripsi yang berjudul, “Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Jakarta Utara” Skripsi ini membahas tentang peran pendamping PKH dalam program pengembangan dan pengentasan kemiskinan masyarakat melalui program keluarga harapan, serta membahas tentang harapan pendamping dan masyarakat pada pemerintah tentang perlindungan sosial.
3. Panji Angga, dengan skripsi yang berjudul, “Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Pilihan Kebijakan Dalam Mengatasi Hambatan Akses Terhadap Pendidikan Dasar di Kecamatan Cilincing” Skripsi ini membahas tentang program keluarga harapan dapat berjalan sebagaimana mestinya tetapi harus lebih banyak pendamping yang diturunkan agar program keluarga harapan (PKH) berjalan seimbang dengan keinginan pendaming dan

masyarakat.

B. Pengertian Pemberdayaan

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak, mendayagunakan berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil. Sedangkan dalam judul skripsi ini pemberdayaan yang dimaksud adalah usaha atau cara dari seseorang atau kelompok dalam hal ini adalah pemerintah untuk memberikan kekuatan berupa materil maupun non materil kepada seseorang atau kelompok yang lemah di dalam masyarakat agar mereka bisa meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.⁸ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

C. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Berbicara mengenai posisi perempuan dalam masyarakat kita, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman awal konsep gender. Pengertian gender berbeda dengan seks (jenis kelamin). Seks adalah perbedaaan jenis kelamin secara biologis, dan seks ini diperoleh semenjak lahir secara biologis sehingga tidak dapat dipertukarkan dan tidak dapat berubah antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2015), h. 324

gender adalah perbedaan kelamin terhadap suatu sikap dan perilaku yang merupakan bentukan dari sosial budaya dan masyarakat. Karena bentukan masyarakat, maka gender tidak berlaku selamanya.

Istilah gender mengacu pada asumsi atau konstruksi oleh masyarakat atas peran-peran dan tanggung-jawab serta perilaku laki-laki dan perempuan, yang dipelajari dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta bervariasi menurut budaya masing-masing masyarakat. Termasuk dalam konsep gender adalah asumsi dan harapan-harapan masyarakat tentang hambatan, kesempatan, kebutuhan, persepsi, dan pandangan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Gender adalah suatu konstruksi sosial. Sementara seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan anatomi. Adapun antara gender dan pemberdayaan perempuan perbedaannya sangat tipis. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa pemberdayaan perempuan adalah gender, dan gender adalah pemberdayaan perempuan.⁹

Untuk mengetahui seluk beluk antara gender dan pemberdayaan perempuan, perlu kita telaah apa arti pemberdayaan secara umum. Pemberdayaan adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi dalam diri dengan turut aktif dalam aktifitas sosial. Adapun pemberdayaan perempuan merupakan upaya optimalisasi potensi perempuan secara umum dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam masyarakat.

Konsep gender lebih menampakkan kelabilan posisinya karena gender dapat berubah berdasarkan pandangan masyarakat dengan melakukan perbandingan

⁹ Evi Alfianti "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin oleh dinas Sosial DIY di hargorejo" Jurnal.Uin Yogyakarta diakses pada tanggal 8 maret 2018 Pukul 20.00 h. 16

antara laki-laki dan perempuan. Sementara pemberdayaan perempuan lebih stabil karena bukan upaya pembandingan posisi berdasarkan jenis kelamin. Akan tetapi, sebagian besar para ahli beranggapan bahwa gender sama dengan pemberdayaan perempuan.

D. Realita Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Di Indonesia, dengan diratifikasinya Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Covention On The Elimination of All Form of Diskrimination Againts Women-CEDAW) pada UU No.7 tahun 1984 yang telah menjadi dasar untuk pembentukan produk-produk hukum (UU) yang memperhatikan kepentingan perempuan namun untuk membentuk kesadaran perempuan untuk ikut secara partisipatif dalam pembangunan tidak cukup dengan produk UU saja, diperlukan juga kerja keras semua pihak (terutama perempuan sendiri) untuk mensosialisasikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk dapat ikut serta dalam pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan pembatasan terhadap akses-akses sumber daya ekonomi dan modal kerja.¹⁰

Kesenjangan gender di dalam kehidupan masyarakat dilihat dari rendahnya peluang yang dimiliki oleh perempuan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, informasi, dan modal kerja. Padahal, diakui atau tidak, perempuan mempunyai andil yang besar dalam memberikan kontribusi penghasilan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, budaya hukum yang terdapat di dalam masyarakat juga masih kurang mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan. Keadaan ini antara lain ditandai

¹⁰ *Ibid*,h.18

dengan masih rendahnya penanganan hukum terhadap kasus yang menimpa kaum perempuan, dan diperburuk pula oleh masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.

Kemiskinan masih menjadi salah satu pemicu terkuat bagi kaum perempuan untuk bekerja di luar negeri, ditambah lagi pendidikannya yang sangat minim karena keterbatasan biaya. Padahal 60% siswa perempuan menempati ranking 10 besar di sekolah mereka. Di samping itu, terjadinya pernikahan dini akibat paksaan perjodohan telah membuat banyak perempuan menjadi janda. Serta kurangnya pengetahuan para orang tua tentang praktik tindak pidana jual beli kaum perempuan. Semua itu merupakan faktor pendukung memuluskan perdagangan ini terjadi. Dengan semangat ingin membantu keluarga keluar dari ranah kemiskinan, maka perempuan-perempuan yang mayoritas berasal dari desa ini termakan oleh rayuan dan janji para calo TKI untuk dibawa, dilabuhkan, dan bekerja di luar negeri.¹¹

Ada beberapa tenaga kerja yang direkrut Agen TKI secara formal yang kemudian ditampung dan dilatih sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Namun demikian pelatihan yang diberikan sangatlah minim dan belum memenuhi bahkan kadangkala jauh dari standar pekerjaan di luar negeri. Kemampuan penguasaan bahasa asing yang tidak memadai adalah penyebab seringnya terjadi miskomunikasi, salah pengertian antara pekerja dan majikan menimbulkan masalah yang cukup fatal; penyiksaan, penganiayaan dalam berbagai bentuk. Pelatihan yang dilakukan oleh agen-agen tenaga kerja tersebut tidak berdasarkan

¹¹ Hhttp://www.g-excess.com/4081/pelaku_pelaku_ekonomi_rumah_tangga_keluarga. Diakses pada tanggal 8 maret 21.00.

kepada assessment spesifikasi pekerjaan yang ditawarkan sehingga akhirnya kemampuan para TKI yang dikirim tidak memenuhi criteria yang diharapkan orang yang mempekerjakannya.

Tidak sedikit pula perempuan yang akhirnya menjadi pekerja seks komersil baik di luar negeri maupun di negeri sendiri karena ditipu oleh oknum agen PJTKI. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang kejahatan-kejahatan trafficking. Melihat fenomena ini, yang harus dilakukan adalah pencegahan terhadap praktek-praktek trafficking, advokasi dan rehabilitasi korban, misalnya beberapa kasus yang telah mengalami gangguan jiwa. Tentu semua pihak harus ambil bagian dalam menangani persoalan bangsa ini. Pemerintah dengan aparatnya yang kuat, harus dapat menegakkan hukum terhadap praktek-praktek penyalahgunaan izin TKI. Penyalur TKI, harus benar-benar bekerja untuk memajukan bangsa dengan menempatkan calon TKI di tempat yang selayaknya perempuan bekerja, dan tidak mementingkan diri sendiri demi mengeruk keuntungan semata. Pelatihan harus bisa menjadikan calon TKI terampil dalam lapangan pekerjaannya termasuk memperhatikan standar bahasa yang akan digunakan.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diharapkan bisa menjadi pengayom masyarakat. Dengan demikian, kedua tokoh ini telah berperan sebagai benteng pencegahan dan sekaligus dapat berperan sebagai media antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi program-program pemberdayaan, dan undang-undang.

Kita akui meskipun ada perempuan menikmati tingkat keamanan ekonomi yang tinggi dan menduduki posisi strategis di sektor publik dan swasta, namun kenyataan tersebut masih sangat jauh dari kenyataan karena mayoritas perempuan hanya dikategorikan sebagai kelompok yang pasif, kelompok yang hanya menerima segala sesuatunya tanpa harus ada keterlibatan secara langsung. Maka, untuk meningkatkan peran perempuan harus melalui penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas adalah strategi yang dilakukan untuk menambah kapasitas, kemampuan dan ketrampilan untuk berpartisipasi dalam wilayah publik. Sedangkan kapasitas yang dikuatkan adalah pengetahuan, pengorganisasian, keahlian individu, dan jaringan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan singkat baik berupa seminar, diskusi antar perempuan, diskusi dalam kelompok pengajian, workshop dan lain-lain.¹²

Dalam mensosialisasikan wacana gender memang hal yang sangat sulit dan dilematis karena harus berhadapan dengan konsep-konsep budaya patriarkis yang telah terkelola sehingga rentan akan praktek diskriminatif yang sistematis terhadap perempuan. Namun dengan pendekatan sosio-kultural dan sosialisasi wacana gender yang gigih serta tidak bertentangan dengan agama, mungkin akan dapat merubah secara perlahan-lahan akan pandangan terhadap peran perempuan dalam pembangunan yang diharapkan akan bisa mengimbangi konsep-konsep budaya patriarkis yang mendominasi peran dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga timbul harmonisasi hubungan antara laki-laki dan

¹² Sri wahyu astuti, "*Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kecamatan Bejen kabupaten Temanggung*",(Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri Semarang), tahun 2013 h. 26

perempuan, dengan bahu membahu dan saling mengisi kekurangan satu sama lain untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.¹³

Dan yang paling penting, yang harus kita pahami adalah wacana gender bukanlah suatu refleksi dari gugatan apalagi pemberontakan kaum perempuan terhadap laki-laki. Sehingga membuat perempuan menjadi male clone (tiruan laki-laki). Namun suatu refleksi terhadap fitrah manusia yang diciptakan untuk saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dengan saling memberi kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan kemampuannya masing-masing. Adanya kementerian Pemberdayaan Perempuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap perempuan Indonesia yang berdaya. Dilihat dari visinya "Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara", maka selayaknya, harus menjalankan program sebaik-baiknya dan bisa menyentuh mayoritas perempuan Indonesia yang berada di pedesaan. Keberadaan kementerian ini harus dioptimalkan dan tentu saja tidak menafikan beberapa program yang telah berjalan saat ini. Semoga perempuan Indonesia semakin maju dan terberdayakan.¹⁴

E. Model Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan harus dimulai dari diri perempuan itu sendiri, dimana pendidikan merupakan faktor kunci sebagai model utama dari pemberdayaan perempuan tersebut, yang ditunjang dan dilengkapi model

¹³ Sugeng Harayanto, " *Peran Aktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin* " Study kasus pada wanita pemecah batu Di Kecamatan Tugu Tenggelek, Jurnal Ekonomi Pembangunan h.219

¹⁴ *Ibid*, h.220

pemberdayaan di bidang psikologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Pada umumnya, profil perempuan (dewasa) di pedesaan adalah miskin, dibebani berbagai jenis pekerjaan, buta aksara, bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Menurut World Education Report, 1993 kurang lebih 905 juta laki-laki dan perempuan yang merupakan hampir seperempat dari penduduk dewasa dunia adalah buta aksara. Dari jumlah ini, 587 juta atau 65 persen adalah wanita.

1. Pendidikan

Pada umumnya, profil perempuan (dewasa) di pedesaan adalah miskin, dibebani berbagai jenis pekerjaan, buta aksara, bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Menurut World Education Report, 1993 kurang lebih 905 juta laki-laki dan perempuan yang merupakan hampir seperempat dari penduduk dewasa dunia adalah buta aksara. Dari jumlah ini, 587 juta atau 65 persen adalah wanita. Pendidikan sebagai tujuan penting, dikemukakan di The International Conference on Population and Development (September 1994 di Cairo) dan di The World Summit for Social Development (Maret, 1995 di Copenhagen). Sejak Konferensi Wanita yang pertama pada tahun 1975 di Mexico city, pendidikan bagi perempuan tetap menjadi masalah kunci yang menempati agenda internasional. Konferensi ketiga Wanita di Nairobi tahun 1985, menekankan bahwa pendidikan sebagai dasar bagi peningkatan dan perbaikan status perempuan dan sarana 6 ISSN 1693-7945 dasar yang harus diberikan kepada perempuan untuk memenuhi peranannya sebagai anggota masyarakat. Kemudian pada Konferensi Dunia keempat di Beijing pada tahun 1995, dimana

pendidikan perempuan menjadi isu penting karena di banyak tempat di dunia ini, anak perempuan masih kurang memperoleh pendidikan, pangan, dan pelayanan dibandingkan dengan anak laki-laki. Di dalam Platform for Action yang dikemukakan pada konferensi keempat ini, pada bagian pendidikan dan latihan bagi perempuan dirumuskan langkah-langkah penting sebagai berikut yaitu: Menjamin persamaan akses atas pendidikan, Menghapus buta aksara diantara wanita, Memperbaiki akses wanita atas latihan keterampilan, sains, dan teknologi serta pendidikan berkelanjutan, Mengembangkan pendidikan berkelanjutan, Mengalokasi sumber dana yang cukup bagi implementasi dan memonitor pembaharuan.

2. Pemberdayaan Psikologi

Pentingnya bagi perempuan untuk mempunyai penghasilan sendiri, yang memungkinkan baginya untuk mengatur dan mengontrol masalah keuangannya sendiri. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa tidak semua perempuan memasuki lapangan pekerjaan dengan tujuan memperkaya dirinya sendiri secara ekonomis, misalnya dalam melakukan kerja sosial, aktualisasi atau pengembangan diri. Walaupun dalam kenyataan, banyak perempuan mencari kerja untuk tujuan meringankan beban pengeluaran keluarga (rumah tangga), membiayai pendidikan dan keperluan keluarganya. Keadaan ini tercermin dalam peran majemuk dari perempuan. Jika perempuan bekerja di luar rumah, pekerjaannya dapat terganggu karena mengalami kehamilan atau menghadapi keadaan darurat yang menuntut kehadirannya di rumah, seperti keadaan anak sedang sakit. Akibatnya, banyak pekerjaan memprioritaskan laki-laki, terutama yang memberi bayaran tinggi

sehingga perempuan hanya memperoleh kesempatan kerja dengan bayaran yang lebih rendah. Pada umumnya, perempuan berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki, meskipun perempuan sudah mengalami perbaikan dan peningkatan keterampilan dan pendidikan profesional. Pada umumnya buruh perempuan tidak mau bersuara atau menuntut hak-haknya karena masalah biaya atau takut kehilangan mata pencahariannya. Implikasi UU Perkawinan (UU RI No. 1 tahun 1974), khususnya Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang mengatur pembagian peran antara suami dan istri adalah bahwa perempuan selalu dianggap lajang sehingga tidak mendapat tunjangan-tunjangan yang pada umumnya diberikan kepada laki-laki. Selain itu, perempuan juga dianggap sebagai penghasil pendapatan nomor dua yang menyebabkan adanya perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan. Selain upah sebagai imbalan prestasi kerja, tenaga kerja juga diberi tunjangan keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Dalam kenyataan, suami diasumsikan sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga sehingga hanya tenaga kerja laki-laki yang dianggap mempunyai keluarga. Selain itu, tunjangan dan fasilitas lainnya seringkali hanya dapat dinikmati oleh tenaga kerja laki-laki saja.

3. Pemberdayaan Sosial Budaya

Logan, Raczynski dan Serrano mengartikan pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berpikir perempuan. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali perempuan dengan kekuasaan dan kekayaan tetapi 7 ISSN 1693-7945 membuat mereka sadar terhadap dirinya, dan apa yang diinginkannya dari hidup ini. Proses pemberdayaan memungkinkan manusia dihadapkan pada berbagai pilihan. Perempuan dapat menentukan menikah atau tidak menikah, mempunyai

anak atau tidak mempunyai anak, tinggal di rumah atau mempunyai karier, atau menggabungkan pilihan-pilihan tersebut. Pemberdayaan psikologi mengandung makna saling menghormati dan menghargai, bukan saja dalam hal apa yang dilakukan masing-masing tetapi juga sebagai insan manusia dan apa yang menjadi pilihan-pilihan hidup. Berdasarkan GBHN dikemukakan bahwa upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia serta pengembangan anak, remaja, dan pemuda menjadi tanggungjawab bersama, baik ibu maupun ayah. Dalam kehidupan keluarga yang merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, negara mengakui de jure bahwa seorang ayah atau bapak sebagai kepala keluarga. Akan tetapi de facto, seringkali seorang ibu menjadi kepala keluarga karena ditinggal suami karena meninggal, cerai, pisah atau kerja di luar kota lain atau alasan lainnya. Dalam keadaan ini, seorang ibu berperan dan bertanggungjawab untuk masalah-masalah di dalam dan di luar rumah. Menurut data statistik tahun 1990 sebanyak 7,7 persen perempuan (10 – 75 tahun) berperan sebagai kepala rumah tangga. Adapun pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan adalah sebagai berikut: 1. Pekerjaan dengan jam kerja yang fleksibel 2. Kerja paruh-waktu 3. Membagi pekerjaan 4. Mengerjakan di rumah 5. Bekerja untuk majikan yang penuh pengertian 6. Melakukan pekerjaan konsultasi 7. Wirausaha.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Proses transformasi ekonomi dapat dibagi ke dalam tiga kategori periode perkembangan yaitu : (1) *the family – based economy*, (2) *the family – wage economy*, and (3) *the family consumer economy*. Pada Periode pertama, *the family – based economy* yaitu rumah tangga menjadi basis dari kegiatan ekonomi,

kegiatan produksi banyak dilakukan di dalam rumah. Hal ini menyebabkan hampir tidak ada perbedaan yang jelas antara kegiatan ekonomi dan kehidupan domestik. Kerja pada periode ini dikonsepsikan sebagai aktivitas produktif bagi (termasuk anak-anak) yaitu tenaga kerja yang mempunyai kontribusi berarti dalam proses produksi. Perempuan berada di posisi yang relatif sentral dalam keluarga karena harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang ada di dalam rumah.¹⁵

Dengan demikian, perempuan mempunyai peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Pada periode ini, perempuan sebenarnya tidak hanya bekerja dalam urusan rumah tangga saja melainkan juga terlihat dalam kegiatan di luar rumah, terutama di bidang pertanian. Bahkan di beberapa tempat dimana kota sudah mulai berkembang, perempuan berpartisipasi pula dalam kegiatan jasa dan perdagangan seperti penjaga toko, pengrajin atau membuka warung-warung makanan. Meskipun demikian, kegiatan yang mereka lakukan tidak berdiri sendiri, tetapi tetap memiliki interdependensi dengan lelaki.¹⁶

Kegiatan ekonomi perempuan memang agak berbeda dengan lelaki, namun tetap ada semacam ketergantungan satu sama lain. Mereka hampir tidak mungkin dipisahkan, terutama karena kelangsungan kegiatan ekonomi, perempuan ikut ditentukan oleh kegiatan ekonomi lelaki dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa status dan peran yang dimiliki oleh perempuan lebih kurang sejajar dengan status dan

¹⁵ Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan*. Cet. 1 (Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2007), h. 213

¹⁶ Riza Risyanti dan Roesmidi, H, *Pemberdayaan Masyarakat*, Cet 2. (Sumedang: :Al-qaprint Jatinangor, 2006), h. 54

peran yang dimiliki oleh lelaki. Periode kedua, *the family – wage economy*, ditandai dengan transformasi kegiatan ekonomi dari pertanian ke perdagangan, sejajar dengan perkembangan kapitalisme. Pada periode ini, tenaga kerja tidak lagi terkonsentrasi pada kegiatan rumah tangga, tetapi di luar rumah terutama di pabrik-pabrik yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan proses industrialisasi dan perkembangan teknologi.¹⁷

Oleh karena itu, kebutuhan rumah tangga dipenuhi dengan upah yang diperoleh dari luar rumah. Pergeseran tenaga kerja dan produksi komoditi semacam itu berpengaruh pada karakter pekerjaan perempuan. Di kalangan perempuan terbentuk apa yang biasa disebut *the development of dual roles* (peran ganda), di satu pihak sebagai tenaga kerja yang memperoleh upah dan di lain pihak sebagai ibu rumah tangga. Pada periode ini, rumah tangga tidak lagi menjadi pusat kegiatan produksi meskipun pekerjaan perempuan di rumah secara ekonomis tetap diperlukan. Hal ini disebabkan karena fokus bekerja di luar rumah, nilai kerja seseorang lebih diukur dari penghasilan yang diperolehnya. Pekerjaan di dalam rumah yang dianggap kurang dihargai karena tidak mendapatkan uang.¹⁸

Nilai pekerjaan semacam ini dianggap rendah (*devaluated*). Tidak mengherankan apabila status dan peran perempuan menjadi kurang sejajar dengan laki-laki. Periode ketiga, *the family consumer economy*, ditandai oleh kehadiran negara (campur tangan pemerintah) dalam sistem upah tenaga kerja. Dalam periode ini, terjadi perubahan teknologi yang cukup pesat dan peningkatan

¹⁷ Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. IV (Yogyakarta: : PT. Pustaka Pelajar)

¹⁸ file:///C:/Users/ROOM%20211/Downloads/wiwik_fp_9.pdf diakses Tanggal 1 Maret 2018

produktivitas yang dalam perkembangannya membuat anggota rumah tangga lebih banyak melakukan fungsi konsumsi dan produksi. Meskipun pada periode ini produksi berada di luar rumah, tenaga kerja dari anggota keluarga mempunyai kontribusi yang sangat berarti bagi perempuan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hal ini dilakukan perempuan berfungsi ganda.

Dalam kondisi demikian, produktivitas perempuan bahkan dapat lebih tinggi daripada periode sebelumnya hanya sayangnya sebagian besar cucuran keringat mereka tidak mendatangkan uang tunai dan konsekuensinya kemudian mereka tidak begitu diperhitungkan. Institusi-institusi seperti sekolah, sistem asuransi, dan industri makanan (terutama *fast food*) telah menggantikan berbagai macam aktivitas yang sebelumnya dikerjakan di dalam rumah.¹⁹ Itulah sebabnya, perempuan hanya dianggap sebagai penerima (*consumer*) meskipun dalam beberapa unsur juga ditemukan bahwa penghasilan yang mereka peroleh masih sangat diperlukan dalam memberi dukungan pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa industrialisasi telah mengubah pola atau pengaturan kesempatan kerja. Perkembangan industri yang melaju dengan pesat disamping menciptakan kelas pekerja (*working class*). Ketika produksi dan dunia perdagangan maju dengan pesat, manajemen juga berkembang semakin kompleks antara lain ditandai dengan meningkatnya pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi dan akuntansi. Meskipun demikian, kesempatan kerja bagi

¹⁹ Op.cit, Riza Risyanti dan Roesmidi, H, *Pemberdayaan Masyarakat*, Cet 2. (Sumedang: :Al-qaprint Jatinangor, 2006), h. 62

perempuan untuk bekerja pada bidang semacam itu seringkali hanya terbatas pada pekerjaan sekretaris atau tata usaha.²⁰

5. Pemberdayaan Politik

Pada *Platform for Action* yang dikemukakan pada Konferensi Dunia keempat mengenai perempuan di Baijing (1995), di bagian pemberdayaan dan pengambilan keputusan dikemukakan bahwa perlu untuk menjamin persamaan akses perempuan atas partisipasi penuh dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Di samping itu pula perlunya meningkatkan kapasitas perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam konteks pemberdayaan politik adalah kedudukan berkuasa dan berwenang untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan banyak dalam masyarakat.²¹ Dalam proses pemberdayaan politik seorang pemimpin, khususnya perempuan perlu memiliki bekal kepemimpinan, sehingga dapat menggerakkan dan membuat perubahan-perubahan sosial ke arah yang lebih baik atau sebagai agent social change. Selain itu, seorang pemimpin perempuan perlu memiliki kemampuan untuk turut mengambil keputusan, yang didukung oleh kemauan dengan menggunakan kesempatan untuk menjadi teman seperjuangan lelaki.²²

²⁰ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Cet I.(Jakarta: Penerbit Centre for Strategic and International Studies (CSIS), h. 76

²¹ Op.cit,

²¹ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Cet I.(Jakarta: Penerbit Centre for Strategic and International Studies (CSIS), h. 76

²² *Ibid*, h. 80

Dan seorang pemimpin perempuan juga harus mempunyai kepekaan terhadap 9 ISSN 1693-7945 lingkungan sehingga dapat menampung aspirasi dan keinginan masyarakat serta mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Keterlibatan perempuan di kancah politik dan lembaga kenegaraan masih relatif sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Dapat dilihat pada data tahun 1990, jumlah perempuan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) hanya 2 orang saja (5,1 persen) dari 37 anggota, di Badan Pengawasan Keuangan (BPK) hanya 6 orang saja (2,0 persen) dari 296 anggota, di Mahkamah Agung (MA) hanya 7 orang saja (12,5 persen) dari 56 anggota, di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 57 orang saja (11,4 persen) dari 500 anggota. (Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, 1990 dalam Onny S. Prijono, 1996: 217).²³

F. Dasar dan Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial. Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut Conditional Cash Transfers (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara yang melaksanakan CCT. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program bersubsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada

²³ *Ibid*, h. 82

saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals atau MDGs). Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu.

Peserta PKH diharapkan (selanjutnya disebut Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu; kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.²⁴

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat

²⁴ Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum PKH*, (Jakarta; Kementerian Sosial RI: 2014), h.1-2

pencapaian target Millenium Development Goals (MDG). Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM.
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.²⁵

G. Ketentuan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Mulai tahun 2012 basis bantuan PKH diarahkan pada KSM (orang tua – ayah, ibu dan anak). Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga adalah satu unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Peserta PKH adalah RTSM/KSM yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

1. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita.
2. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
3. Anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

H. Kewajiban Peserta PKH

²⁵ Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum PKH*, (Jakarta; Kementerian Sosial RI: 2014), h.13

Ada beberapa kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi yaitu;

a. Kewajiban Bidang Kesehatan.

Peserta PKH telah memiliki kartu PKH, wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH. Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

b. Kewajiban Bidang Pendidikan

Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan atau terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/ Salafiyah Ula/ paket A atau SMP/MTs/SMLB/ Salafiyah Wustha/ paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan.

Bagi anak pengandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan nonreguler yaitu SDLB atau SMLB. Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan atau terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau nonreguler (SD/MI, atau SMP/MTs, atau paket A atau paket B). Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak

tersebut harus mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk pekerja anak.²⁶

I. Pendapatan Keluarga

1. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga lainnya. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kebutuhan jasmani, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat material, pendapatan yang sebenarnya diperoleh rumah tangga dan dapat digunakan untuk membeli barang atau untuk ditabung.

Dengan kata lain bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Dimana pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, atau deviden serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya semakin baik (tinggi) tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi makin besar.

²⁶ Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum PKH* (Jakarta : Kementerian Sosial RI, 2014), h.18-22

Menurut poerwadarminto pendapatan adalah hasil pencarian atau perolehan dari usaha dan bekerja. Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang baik berupa uang atau barang yang merupakan hasil kerja atau usaha.

2. Keluarga

Keluarga ialah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya. Keluarga juga biasa diartikan sebagai salah satu persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara laki laki dengan perempuan yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

3. Pendapatan keluarga

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan yang riil dari seluruh anggota keluarga yang digunakan untuk kebutuhan bersama maupun kebutuhan perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan balas karya atau jasa imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Pendapan dapat berupa barang atau uang misalnya, berupa santunan baik berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak dan lain sebagainya. Pendapatan rumah tangga yang satu pasti berbeda dengan pendapatan rumah tangga yang lain , sesuai dengan kegiatan perekonomian kepala rumah tangga akan tetapi pendapatan setiap rumah tangga tidak terlepas dari hal hal sebagai berikut :

a. Pendapatan pokok

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan yang bergantung pada mata pencaharian kepala rumah tangga, apakah itu seorang pegawai atau karyawan, maka pendapatan pokok berupa gaji atau upah yang diterima setiap bulan.

b. Pendapatan tambahan

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan, mungkin pendapatan seperti ini sulit di perkirakan dengan pasti.

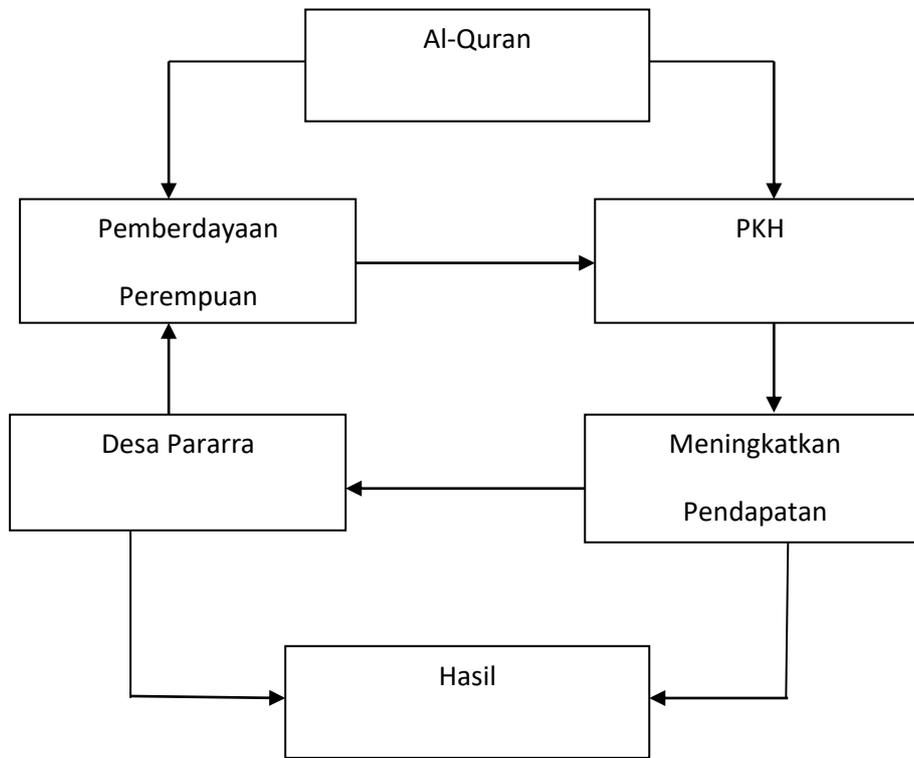
c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta, dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain lain karena hal ini dianggap dapat membantu pembelanjaan rumah tangga. Meskipun demikian pendapatan lain lain juga sangat sulit diperkirakan.

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal dan informal. Pendapatan formal adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima sebagai balas jasa, sedangkan pendapatan informal adalah berupa penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya.²⁷

J. Kerangka fikir

²⁷ Husein Syahatah, "Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.



Gambar.1

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa pararra dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metodologi adalah suatu studi sistematis melalui prosedur dan tehknik yang dihubungkan dengan sesuatu. Sedangkan metode penelitian adalah metode metode yang dilakukan dalam tahap penelitian.²⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sosiologis histori, dan yuridis empiris. Menurut Sri Mulyanti dalam penelitiannya yang berjudul peran ganda wanita jawa dalam perspektif islam mengatakan bahwa pendekatan sosiologis historis yaitu cara mendekati suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan lebih mementingkan pola-pola hubungan dalam kehidupan sosial.²⁹ Pendekatan normatif adalah studi islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal atau normatif. Yang dimaksud legal formal tersebut maksudnya yaitu tentang halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya.³⁰ Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan kehidupan masyarakat.³¹

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk

²⁸ *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makalah Skripsi dan Tesis)*, STAIN Palopo 2012, h. 10

²⁹ Sri Mulyati, *Peran Ganda Wanita Dalam Perspektif Islam Studi Tentang Ibu-Ibu Pedagang Pasar Klewer*, (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta:2012),h.15

³⁰ Wardah. *Pendekatan Dalam Study Islam*’. Blog Wardah <http://wardahcheche.blogspot.com>, pendekatan-dalam-studi-islam. Html (26 April 2018)

³¹ Lisa Nofrianti. “ *Pendekatan Empiris*”. Blog Lisa Nofrianti. <http://lisanofrianti.blogspot.com>, pendekatan-empiris.html (26 April 2018)

mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dusun sangkale, desa pararra, kec, sabbang, kab, luwu utara. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 14 hari terhitung dari tanggal 26 maret sampai dengan 9 april 2017.

C. Informan/Subjek Penelitian

Informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ibu ibu rumah tangga di dusun sangkale desa pararra yang mendapatkan bantuan dana program keluarga harapan (PKH).

D. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti. Yaitu kepala desa pararra dan ibu-ibu rumah tangga yang mendapatkan bantuan dana program keluarga harapan (PKH) dengan melakukan wawancara secara langsung.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitian, data ini diperoleh dengan cara :
 - a. Pencatatan yaitu dengan cara mencatat laporan yang mendukung penelitian.
 - b. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Menurut Joko Subagyo, observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan mengenai objek penelitian.³² Dari pengertian diatas sangat jelaslah bahwa observasi adalah pengamatan terhadap objek yang diteliti.

Namun seringkali orang mengartikan bahwa observasi sebagai aktifitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu hanya dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologis, observasi atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, pengobservasian dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pengecapan.

Dengan demikian observasi merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan. Oleh karena itu observasi merupakan bentuk instrumen yang penulis gunakan untuk memperoleh data dengan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti.

2. Metode Wawancara

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara melalui wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dimana dua orang atau lebih

³² Joko Subagyo, *Metode Penelitian(Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 36.

secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dan masing-masing dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden) dengan berbicara langsung (face to face) dengan orang tersebut.³³

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi. Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan seperti pemberian dan pengumpulan bukti bukti dan keterangan keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain). Hal ini dilakukan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam pemecahan masalah-masalah dalam penelitian yang dilakukan di dusun sangkale desa pararra kecamatan sabbang kabupaten luwu utara yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian oleh peneliti.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data maka dilakukan suatu analisis yang merupakan hal terpenting dalam metode ilmiah yang berguna untuk memecahkan masalah. Analisis data meliputi kegiatan meringkas data yang telah dikumpulkan menjadi suatu jumlah yang dapat dikelola. Data yang dikumpulkan lewat referensi atau kepustakaan dianalisis dengan:

³³ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2007) h. 69

1. Teknik Induktif, yakni teknik analisa data yang bertitik tolak teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
2. Teknik Deduktif, yaitu satu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Pararra

Pararra adalah salah satu desa yang tertua di kecamatan sabbang, diperkirakan keberadaannya sebelum indonesia merdeka Tahun 1945. Setelah itu terjadi pergolakan perjuangan pemudah dan rakyat luwu melawan tentara (NICA) yang ingin kembali menjajah indonesia pada tahun 1948-1949. Dan kemudian pemberontakan DI/TII kahar muzakkar 1953-1965, dan pada tahun 1965 awal perubahan sistem pemerintahan dari tomokaka menjadi kepala desa, dan disaat itulah terbentuk desa pararra tahun 1965 sampai sekarang. Dimana desa pararra telah dipimpin oleh tujuh kepala desa, yaitu :

1. Kepala Desa Ke-1 : Abu Dg.Mawakka, 1948 s/d 1965
2. Kepala Desa Ke-2 : Tema To Mihara, 1965 s/d 1982
3. Kepala Desa Ke-3 : Mangun Pakan, 1982 s/d 1993
4. Kepala Desa Ke-4 : Bachrun Zaur. S, 1993 s/d 1994
5. Kepala Desa Ke-5 : Idrus To Pacawang, 1994 s/d 2000
6. Kepala Desa Ke-6 : Basri Abdillah, 2000 s/d 2014
7. Kepala Desa Ke-7 : Nirwan.L 2014 Sampai Sekarang.

Sebelumnya pada tahun 1953 desa pararra dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa pararra dan desa tandung, desa pararra dipimpin oleh Abu Dg.Mawakka dan desa tandung dipimpin oleh Maddiaja To Kurniati. Selanjutnya pada tahun 1994 dimekarkan lagi menjadi dua desa yaitu desa pararra dan desa tulak tallu, dimana desa tulak tallu pada waktu itu dipimpin oleh Abd.Latief.

Perkembangan desa pararra pada kenyataannya sangatlah lambat dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Sejak zaman kemerdekaan sampai tahun 1965 daerah ini merupakan daerah yang tidak kondusif, banyak aset dan harta benda yang hilang bahkan sering terjadi perselisihan antara warga sehingga mengakibatkan banyak korban nyawa.
 2. Daerah tersebut termasuk daerah yang terisolir dan tertinggal, sehingga pada tahun 1997 mendapat bantuan dana impres daerah tertinggal (IDT) dari pemerintah.
 3. Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat minim dan memprihatinkan.
2. Letak Geografis

Desa Pararra secara geografisnya terletak dibagian barat Kecamatan Sabbang, adapun teritorial batas wilayah desa pararra yaitu sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Malimbu
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Buangin
- Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Tandung
- Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Tulak Tallu

Keadaan iklim di desa parrara terdiri dari musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasa terjadi antara bulan januari sampai dengan bulan april, sedangkan musim kemarau antara bulan juli sampai dengan bulan november, dan musim pancaroba antara bulan mei sampai dengan bulan juni. Selain itu, kondisi geografis desa pararra memiliki ketinggian 600 m

diatas permukaan laut, curah hujan 327 mm/Tahun, Topografi pegunungan dan pedalaman, dan suhu udara 32 C.

3. Potensi desa

a. Jumlah penduduk

Desa pararra memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Jumlah penduduk desa pararra sampai dengan bulan february 2018 sebanyak 1.779 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran satu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan atau potensi pembangunan.

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktifitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti dengan peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya pertambahan jumlah penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Pararra Sesuai dengan
Dusun/Lingkungan

No	Nama Dusun	Jumlah jiwa	Kepala
----	------------	-------------	--------

					Keluarga
		L	P	L+P	
1	Dususn Pararra	199	187	386	70
2	Dususn Sangkale	245	234	479	88
3	Dusus Rante Tako	195	107	302	56
4	Dususn Lena	190	155	345	54
5	Dusun saluturunan	155	112	267	59
	Jumlah	986	715	1779	327

a. Pendidikan

Pada umumnya pendidikan masyarakat desa pararra memiliki pendidikan yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tingkat pendidikan masyarakat desa pararra

Pra sekolah	SD	SMP	SMA	S1
10%	40%	25%	20%	5%

a. Pekerjaan

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa pararra adalah bertani dan berkebun, lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur memiliki luas

sekitar 200 ha yang terbentang luas tersebar disetiap dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan tehknologi yang tepat. Dan juga ada beberapa jenis ternak yang berpotensi dikembangkan masyarakat, seperti bebek, ayam, sapi, kuda dan kerbau.

Tabel 1.3 Tingkat Pekerjaan

Petani	Pedagang	Buruh	PNS
98%	1%	0,5%	0,5%

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya, pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja dimana masyarakat yang mencari kerja tidak dapat tertserap sepenuhnya pada lapangan kerja yang tersedia khususnya di sektor pemerintahan atau sektor swasta/perusahaan karena memang daya serap dari sektor tersebut sangatlah terbatas, sehingga sebagai katup pengaman masyarakat harus dikembangkan dan diberdayakan melalui usaha kerja mandiri/wirausaha.

a. Agama

Pendududuk desa pararra semua menganut agama islam,dapat dilihat pada tabel sebagi berikut ini:

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	laki laki	perempuan	jumlah
1	ISLAM	1064	715	1779
2	KRISTEN	–	–	–
3	KHATOLIK	–	–	–
4	HINDU	–	–	–
5	BUDDA	–	–	–

b. Sumber daya manusia

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemudah dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Namun ekonomi masih menjadi alasan yang utama penyebab tingginya angka putus sekolah dikalangan anak usia sekolah khususnya kejenjang perguruan tinggi. Hal ini menjadi tantangan terendiri bagi pemerintah desa parrara.

c. Sarana Dan Prasarana

Adapaun sarana dan prasarana di desa pararra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5 Sarana dan prasarana desa pararra

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Kantor Desa	1 Unit

2	Pustu	1 Unit
3	Jalan Desa	9 Km
4	SD	2 Unit
5	Mesjid	5 Unit
6	Jembatan Gantung	6 Unit
7	Air Bersih	4 Unit
8	Posyandu	5 Unit

B. Hasil Penelitian

1. Profil Ibu PKH

Jumlah Informan Dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yaitu Ibu-ibu rumah tangga yang mendapatkan bantuan dana program keluarga harapan (PKH) Di Dusun Sangkale Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 1.6 Ibu-Ibu PKH

No	Nama Ibu-ibu PKH	Jabatan
1	Rika	Ketua

2	Hasmia	Sekretaris
3	Jumasra	Bendahara
4	Wisma	Anggota
5	Junarti	Anggota
6	Hasriati	Anggota
7	Nurhasni	Anggota
8	Masria	Anggota

a. Ibu Rika

Ibu rika yang berusia 42 tahun tinggal di dusun sangkale desa pararra, ibu rika ialah ketua ibu ibu pkh. Pendidikannya hanya tamatan SMA dan suaminya hanya tamatan SMP. Ibu rika mempunyai 2 orang anak laki laki, dimana semuanya masih sekolah. Anak pertama sekolah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di palopo, dan anak kedua sekolah di sekolah menengah pertama (SMP). Suami ibu rika berprofesi sebagai tukang ojek.

b. Ibu Hasmia

Ibu hasmia yang berusia 48 tahun memiliki 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan dimana 3 di antaranya masih sekolah dan 1 sudah putus sekolah karena alasan ekonomi kurang memadai. anak kedua dan ketiga sekolah di sekolah menengah atas (SMA) dan anak ke empat sekolah di sekolah menengah pertama (SMP). Suami ibu hasmia berpropesi sebagai petani.

c. Ibu Jumasra

Ibu jumasra berusia 53 tahun dan memiliki 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, 4 diantaranya masih sekolah dan 2 diantaranya sudah putus sekolah. Anak ketiga dan keempat sekolah di sekolah menengah atas (SMA), anak kelima sekolah di sekolah menengah pertama(SMP) dan anak keenam sekolah di sekolah dasar (SD). Suami ibu jumasra berprofesi sebagai petani.

d. Ibu Wisma

Ibu wisma berusia 32 tahun dan memiliki 2 orang anak perempuan dimana semuanya masih sekolah. Anak pertama sekolah di sekolah menengah pertama (SMP) dan anak kedua sekolah di sekolah dasar (SD). Suami ibu wisma berprofesi sebagai petani.

e. Ibu hasriati

Ibu hasriati berusia 25 tahun dan memiliki 1 orang anak yang belum sekolah. Suami ibu hasriati berprofesi sebagai petani..

f. Ibu junarti

Ibu junarti berusia 45 tahun dan memiliki 2 orang anak yang masih sekolah. Anak pertama sekolah di perguruan tinggi yang ada di masamba dan anak kedua sekolah di sekolah menengah pertama (SMP). Suami ibu junarti berprofesi sebagai petani.

g. Ibu nurhasni

Ibu nurhasni berusia 28 tahun dan memiliki 2 orang anak, satu diantaranya sekolah di sekolah dasar (SD) dan anak kedua belum sekolah. Suami ibu nurhasni berprofesi sebagai tukang ojek.

h. Masria

Ibu masria berusia 37 tahun dan memiliki 2 orang anak yang masih sekolah, anak pertama sekolah di sekolah menengah atas (SMA) dan anak kedua sekolah di sekolah dasar (SD). Suami ibu masria berprofesi sebagai petani.

Dari 8 (delapan) ibu ibu di Dusun Sangkale Desa Pararra Kecamatan sabbang kabupaten Luwu utara yang mendapatkan bantuan dana Program keluarga Harapan (PKH) hanya ada 3 orang saja yang mengelola dana tersebut melalui usaha kecil-kecilan, yaitu ibu Rika, Ibu Hasriati dan Ibu Masria.

1) Ibu rika

Ibu Rika mendapatkan bantuan dana program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah sebesar Rp 650.000/3 bulan. Kemudian dana tersebut dikelola melalui usaha kecil-kecilan, Ibu rika menjual makanan seperti bakwan, mie siram, dan grupuk. Penghasilannya tidak pasti, namun perkiraan penghasilan dalam satu bulan bisa mencapai sekitar Rp 400.000 sampai Rp 500.000. Tentu saja hal tersebut sangat membantu perekonomian keluarga ditambah lagi penghasilan suami yang berprofesi sebagai tukang ojek, penghasilan suami juga tidak pasti tetapi dalam satu bulan bisa mencapai Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1,500,000 jika di gabungkan penghasilan rumah tangga rata-rata Rp 1. 650.000 setiap bulan.³⁴

2). Ibu Hasriati

Ibu hasriati mendapatkan bantuan dana program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah sebesar Rp 650.000/3 bulan. Kemudian dana tersebut dikelola

³⁴Ibu Rika, "*Wawancara*". Pararra: 29 Maret 2018

melalui usaha kecil-kecilan dengan menjual minuman sejenis jus, pop ice, nutrisari dan lain sebagainya. Penghasilannya tidak menentu, tapi dalam setiap harinya ibu Hasriati bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp 15.000 sampai dengan Rp 20.000. Jika di rata-ratakan setiap bulannya ibu Hasriati bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp 550.000, hal ini sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dan pengeluaran masih cukup relatif kecil karena keluarga ini masih dikaruniai 1 anak yang belum sekolah. Ditambah lagi dengan penghasilan suami yang berprofesi sebagai petani bisa mencapai Rp 900.000 sampai dengan Rp 1.000.000, jadi penghasilan rumah tangga bisa mencapai Rp 1.400.000 sampai dengan 1.500.000.³⁵

3). Ibu Masria

Ibu Masria mendapatkan bantuan dana program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah sebesar Rp 650.000/3 bulan. Dana tersebut dikelola dengan menjual di salah satu sekolah dasar yang ada di desa Pararra. Adapun bahan jualan ibu Masria seperti kue pawah, pisang goreng, donat dan lain sebagainya. Penghasilan ibu Masria bisa mencapai Rp 600.000 sampai dengan Rp 700.000 setiap bulannya, didukung dengan penghasilan suami yang berprofesi sebagai petani sekitar Rp 1.000.000 setiap bulannya, jika digabungkan penghasilan rumah tangga rata-rata 1.650.000 setiap bulannya.

“Bantuan dana program keluarga harapan (PKH) sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga saya, saya mengelola dana tersebut dengan membuka usaha kecil-kecilan untuk membantu suami dalam mencari nafkah”³⁶

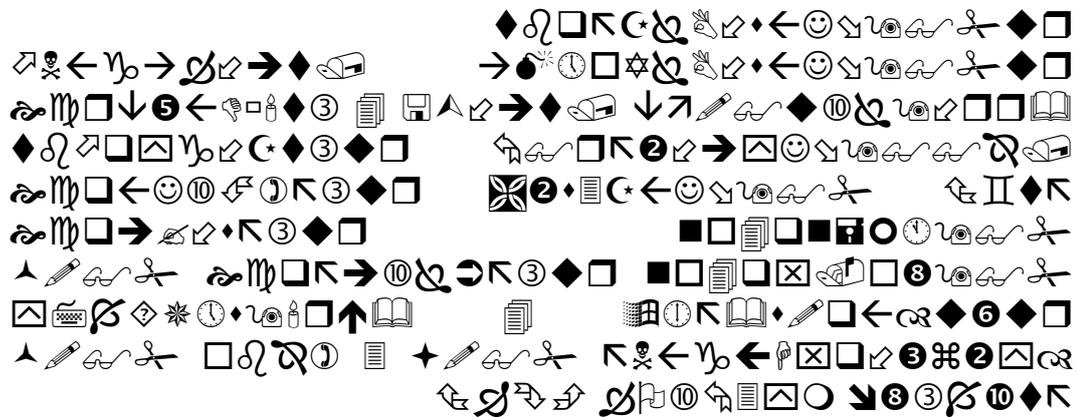
³⁵ Ibu Hasriati, “*Wawancara*”. Pararra: 30 Maret 2018

³⁶ Ibu Masria, “*Wawancara*”. Pararra: 30 Maret 2018

Dari pernyataan informan diatas menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan melalui bantuan dana program keluarga harapan (PKH) tentunya sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga, terutama bagi ibu-ibu yang mengelola bantuan dana tersebut melalui usaha kecil kecilan.

Seperti yang diungkapkan informan diatas bahwa ibu ibu pkh bekerja diluar rumah untuk membantu suaminya dalam menambah kebutuhan sehari harinya. Para ibu tidak ingin membebankan semua kebutuhan keluarga kepada suami, mereka ingin kebutuhan ditanggung bersama untuk mencapai kesejahteraan keluarga

Dalam Q.S AT-Taubah : 17 yang berbunyi :



Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”³⁷

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan”, (Depok: Cahaya Quran 2011).

Ayat diatas menjelaskan pentingnya kerja sama antara istri dan suami dalam rumah tangga. Saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan seperti dalam mendirikan shalat menunaikan zakat dan tidak terkecuali kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks suami dan istri, keberhasilan istri baik dalam bekerja maupun dalam ibadah juga menjadi bagian dari tanggung jawab suami. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan suami juga menjadi bagian dari tanggung jawab seorang istri.

Salah satu wujud kerjasama antara suami dan istri di dusun sangkale desa pararra kecamatan sabbang kabupaten luwu utara yaitu istri ikut serta membantu suami dalam mencari nafkah dengan mengelola bantuan dana program keluarga harapan (PKH) yang di berikan oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan informan berikut:

“Saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan dana program keluarga harapan (PKH), karena dengan bantuan dana tersebut saya bisa sedikit membantu suami saya untuk mencari nafkah dengan membuka usaha kecil kecilan, meskipun penghasilannya tidak seberapa tapi setidaknya sedikit membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga”.³⁸

Berbeda dengan hasil wawancara terhadap ibu ibu yang tidak mengelola bantuan dana program keluarga harapan (PKH), mereka hanya menghabiskan dana tersebut untuk konsumsi, seperti yang dikatakan informan sebagai berikut :

“Pemerintah memberikan dana memang untuk di konsumsi, dapat bantuan dana program keluarga harapan (PKH) sudah bersyukur”³⁹

Kemudian informan lain menambahkan bahwa:

“Untuk apa pusing, lebih baik saya gunakan langsung untuk keperluan rumah tangga”⁴⁰

³⁸Ibu Rika, “*Wawancara*”. Pararra: 1 April 2018

³⁹Ibu Junarti, “*Wawancara*”. Pararra: 1 April 2018

“Bantuan Dana yang diberikan oleh pemerintah kepada saya melalui program keluarga harapan (PKH) saya gunakan untuk keperluan peralatan sekolah anak saya dan sisahnya saya gunakan untuk keperluan rumah tangga”⁴¹

Pernyataan informan diatas memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah untuk membantu masyarakat memberikan arahan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, terutama bagi ibu-ibu yang mendapatkan bantuan dana program keluarga harapan (PKH) yang hanya menghabiskan dana tersebut untuk konsumsi tanpa mereka mengelola dana tersebut sebagai sumber pendapatan.

Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat.

Meskipun pendidikan ibu-ibu PKH di Dusun sangkale Desa Pararra bisa dikatakan rendah tetapi dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemberdayaan perempuan terutama untuk ibu-ibu PKH setidaknya mampu membuka pola pikir ibu-ibu PKH dalam mengelola bantuan dana program keluarga harapan (PKH) untuk membantu perekonomian keluarga.

1. Aktifitas Ibu PKH

Berbicara Masalah aktifitas atau rutinitas kegiatan ibu rumah tangga, bisa dibbilang kegiatan mereka sangatlah menjemukan. Bisa dibayangkan tiap hari selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kegiatan mereka kebanyakan itu-itu

⁴⁰Ibu Wisma, “*Wawancara*”. Pararra: 1 April 2018

⁴¹ Ibu Nurhasni, “*Wawancara*”. Pararra: 1 April 2018

saja, bisa dibayangkan kejenuhan yang sebenarnya mereka rasakan dalam menjalani hari-harinya.

Tapi dari sebagian besar ibu rumah tangga yang dengan sadar menjalani kehidupannya sangat sedikit yang mengeluh dan bahkan menyerah, hal ini dikarenakan sebagai seorang ibu rumah tangga seutuhnya haruslah memiliki komitmen dan juga kesadaran bahwa hal tersebut semata-mata karena demi perkembangan anak dan juga sebagai bhakti kepada suami dan keutuhan keluarga.

Dari hasil wawancara terhadap ibu-ibu PKH, Selain mengerjakan tugasnya sebagai seorang istri ada beberapa ibu ibu PKH yang sudah terbiasa bekerja diluar rumah untuk membantu suami dalam mencari nafkah, seperti yang dikatakan informan berikut ini:

“bekerja diluar rumah hal yang biasa bagi saya, saya sering bekerja membantu suami dalam mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga, Saya biasanya pergi mencari sayur pakis kemudian saya menjualnya dipasar”⁴²

Dengan menjual sayur dipasar para ibu ibu pkh memiliki tambahan peran disamping mengurus rumah dan mendidik anaknya. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Tabel 1.7 Aktifitas Ibu Ibu PKH

No	Jenis Aktifitas	Keterangan

⁴²Ibu Jumasra, “*Wawancara*”. Pararra: 28 Maret 2018

1	Shalat	Setiap hari
2	Mengurus Suami dan Anak	Setiap hari
3	Membersikan Rumah	Setiap hari
4	Mencuci	Setiap hari
5	Memasak dan Menyiapkan makanan	Setiap hari
6	Belanja Kebutuhan Sahari-hari	Setiap Hari selasa dan Minggu
7	Pengajian	Setiap Hari Jumat
8	Menjual	Setiap hari
9	Rapat PKH	Setiap Tanggal 10

Sumber: Observasi Lapangan Tanggal 25 Maret 2018

Dengan memiliki tugas yang begitu banyak ibu-ibu pkh mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memiliki kemampuan yang cukup baik untuk melaksanakan tugas tugasnya dengan baik secara bersamaan.

2. Pembahasan

1. pemberdayaan kaum perempuan

Pada dasarnya ekonomi bagi keluarga merupakan faktor yang dapat mendukung kebahagiaan rumah tangga disamping faktor faktor lain. Berkaitan dengan masalah ekonomi, kondisi ini banyak bermunculan bagi kaum perempuan, selain menjalankan tugas tugasnya sebagai fitrah yang harus di junjung tinggi dalam memposisikan diri sebagai ibu rumah tangga, perempuan juga ikut serta dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Tujuan perempuan mencari nafkah diluar rumah yang tak lain adalah adanya harapan peningkatan ekonomi keluarga. Dari hasil pengamatan wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada ibu ibu pkh desa pararra, kecamatan sabbang, ibu rumah tangga telah terbiasa mencari nafkah guna membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Dari profesi ibu rumah tangga yang termasuk diantaranya mengelolah dana bantuan pkh yang di berikan oleh pemerintah.

Latar belakang perempuan ikut serta dalam mencari nafkah di sebabkan karena beberapa faktor, ada karena faktor ekonomi keluarga yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga harus ditopang oleh kedua bela pihak (suami dan istri), dan juga faktor dimana perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga dalam artian sebagai single parent, juga ada yang semata mata hanya mencari kesibukan yang menghilangkan kepenatan dalam rumah tangga.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi dilapangan berdasarkan hasil wawancara, faktor penyebab keikut sertaan perempuan dalam mencari nafkah

mayoritas dari 8 ibu ibu pkh yang saya teliti, menjawab bahwa faktor ekonomilah yang menjadi penyebab sehingga perempuan ikut serta dalam mencari nafkah.

Selain hal di atas pada dasarnya ada suatu asumsi yang menjadi dasar keikutsertaan ibu rumah tangga dalam dunia kerja adalah bahwa ekonomi keluarga pasti akan meningkat jika ditopang oleh kedua pihak karena pendapatan yang diperoleh akan berlipat ganda, dibandingkan dengan yang hanya ditopang oleh satu belah pihak saja, dan biaya operasional serta konsumsi akan terasa lebih ringan jika sehingga rumah tangga masih memiliki kesempatan untuk kebutuhan lain dari sisa saldo yang dimiliki baik untuk keperluan pelengkap maupun keperluan untuk menabung.

Peran serta dalam perekonomian yang dilakukan oleh perempuan tidak selamanya memiliki dampak yang positive melainkan juga terdapat dampak yang negative, dalam hal ini perempuan yang memiliki peran ganda baik domestic maupun public menuai sebuah problematika tersendiri sehingga menuai pro dan kontra. Oleh sebab itu, perlu diketahui bagi setiap perempuan yang bekerja diluar rumah yaitu problematika tentang kemudharatan serta kemaslahatan atau kemanfaatan.

Berdasarkan hasil pengamatan wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada ibu-ibu rumah tangga di dusun sangkale, desa pararra, kecamatan sabbang, kabupaten luwu utara, bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perempuan yaitu melalui program keluarga harapan (PKH).

Pemerintah memberikan bantuan dana secara tunai sebesar Rp 650.000/3

bulan kepada ibu-ibu PKH untuk dikelola guna meningkatkan pendapatan keluarga. Bantuan dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin melalui program keluarga harapan (PKH) sangat membantu perekonomian masyarakat. Namun dari 8 responden ibu-ibu PKH hanya ada 3 orang saja yang dapat mengelola dana tersebut.⁴³ Yaitu ibu Rika, Ibu Hasriati dan Ibu Masria.

Hal tersebut hendaknya pemerintah selalu mengadakan pembinaan kemampuan dan keterampilan bagi pemberdayaan perempuan, sehingga dapat mengembangkan keterampilan yang lain.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diharapkan bisa menjadi pengayom masyarakat. Dengan demikian, kedua tokoh ini telah berperan sebagai benteng pencegahan dan sekaligus dapat berperan sebagai media antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi program-program pemberdayaan, dan undang-undang.

Kita akui meskipun ada perempuan menikmati tingkat keamanan ekonomi yang tinggi dan menduduki posisi strategis di sektor publik dan swasta, namun kenyataan tersebut masih sangat jauh dari kenyataan karena mayoritas perempuan hanya dikategorikan sebagai kelompok yang pasif, kelompok yang hanya menerima segala sesuatunya tanpa harus ada keterlibatan secara langsung. Maka, untuk meningkatkan peran perempuan harus melalui penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas adalah strategi yang dilakukan untuk menambah kapasitas, kemampuan dan ketrampilan untuk berpartisipasi dalam wilayah publik. Sedangkan kapasitas yang dikuatkan adalah pengetahuan, pengorganisasian,

⁴³Nirwan L, Kepala Desa Pararra, "Wawancara". Pararra: 28 Maret 2018

keahlian individu, dan jaringan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan singkat baik berupa seminar, diskusi antar perempuan, diskusi dalam kelompok pengajian, workshop dan lain-lain.⁴⁴

Dalam mensosialisasikan wacana gender memang hal yang sangat sulit dan dilematis karena harus berhadapan dengan konsep-konsep budaya patriarkis yang telah terkelola sehingga rentan akan praktek diskriminatif yang sistematis terhadap perempuan. Namun dengan pendekatan sosio-kultural dan sosialisasi wacana gender yang gigih serta tidak bertentangan dengan agama, mungkin akan dapat merubah secara perlahan-lahan akan pandangan terhadap peran perempuan dalam pembangunan yang diharapkan akan bisa mengimbangi konsep-konsep budaya patriarkis yang mendominasi peran dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga timbul harmonisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan bahu membahu dan saling mengisi kekurangan satu sama lain untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.⁴⁵

Dan yang paling penting, yang harus kita pahami adalah wacana gender bukanlah suatu refleksi dari gugatan apalagi pemberontakan kaum perempuan terhadap laki-laki. Sehingga membuat perempuan menjadi male clone (tiruan laki-laki). Namun suatu refleksi terhadap fitrah manusia yang diciptakan untuk saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dengan saling memberi kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan kemampuannya masing-masing. Adanya

⁴⁴ Sri wahyu astuti, “*Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kecamatan Bejen kabupaten Temanggung*”,(Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang), tahun 2013 h. 26

⁴⁵ Sugeng Harayanto, “ *Peran Aktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin*” Study kasus pada wanita pemecah batu Di Kecamatan Tugu Tenggalek, Jurnal Ekonomi Pembangunan h.219

kementrian Pemberdayaan Perempuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap perempuan Indonesia yang berdaya. Dilihat dari visinya "Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maka selanjutnya, harus menjalankan program sebaik-baiknya dan bisa menyentuh mayoritas perempuan Indonesia khususnya yang berada di daerah pedesaan. Keberadaan kementrian ini harus dioptimalkan dan tentu saja tidak menafikan beberapa program yang telah berjalan saat ini. Semoga perempuan Indonesia semakin maju dan terberdayakan.⁴⁶

Dalam hal ini tidak lepas dari peran pemerintah setempat untuk memberikan kontribusi atau sumbangsinya untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya Pemerintah secara optimal dan mendalam.

⁴⁶ *Ibid*, h.220

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebelumnya, penulis dapat mengemukakan kesimpulan terkait pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga di dusun Sangkale Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pemberdayaan perempuan yang ikut berperan meningkatkan pendapatan keluarga melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dan membawa dampak yang positive terhadap social ekonomi keluarganya. Dimana pemberdayaan perempuan melalui bantuan dana program keluarga harapan (PKH) yang diberikan oleh pemerintah tentunya sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga, terutama bagi ibu-ibu yang mengelola bantuan dana tersebut melalui usaha kecil kecilan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas kiranya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Desa Pararra

a. Hendaknya selalu mengadakan pembinaan kemampuan dan keterampilan bagi pemberdayaan perempuan, sehingga dapat mengembangkan keterampilan yang lain.

b. Hendaknya memperbanyak program pemberdayaan masyarakat, untuk membantu peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pararra

2. Kepada Ibu-Ibu PKH

a. Dalam penggunaan pendapatan keluarga, harus mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan yang paling utama dan mendesak terlebih dahulu.

b. Para kaum perempuan ibu-ibu PKH harus berusaha rutin menyisihkan pendapatan untuk ditabung guna keperluan pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama, Syaamil Qur'an, Bandung, 200. Ayat 97

Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI,
Pedoman

Operasional Kelembagaan PKH Daerah (Jakarta : Kementerian Sosial RI, 2011),

Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI,
Pedoman Umum PKH, (Jakarta; Kementerian Sosial RI: 2014)

Dimas Abu Farhan, "*Pemberdayaan kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga*" di kecamatan Lampung Tengah, tahun 2017

Evi Alfianti “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin oleh dinas Sosial DIY di hargorejo” Jurnal.Uin Yogyakarta.

[file:///C:/Users/ROOM%20211/Downloads/wiwik_fp_9. pdf](file:///C:/Users/ROOM%20211/Downloads/wiwik_fp_9.pdf) diakses Tanggal 1 Maret 2018

Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Husein umar, *Metodologi penelitian Aplikasi dalam Pemasaran*, (Jakarta: PTRadja Grafindo Persada) tahun 2011

Husein Syahatah, “*Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 49

Hhttp://www.g-excess.com/4081/pelaku_pelaku_ekonomi_rumah_tangga_keluarga

Joko Subagyo, *Metode Penelitian(Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999

Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Cet I.(Jakarta: Penerbit Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2015),

Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makalah Skripsi dan Tesis), STAIN Palopo 2012, h. 10

Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan*. Cet. 1 (Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2007)

Riza Risyanti dan Roesmidi, H, *Pemberdayaan Masyarakat*, Cet 2. (Sumedang: :Al-qaprint Jatinangor, 2006)

Skarno Wibowo,*Ekonomi Mikro Islam* ,(Bandung Pustaka Seti,2013)

Sugeng Harayanto, “ *Peran Aktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin*” Study kasus pada wanita pemecah batu Di Kecamatan Tugu Tenggelek, Jurnal Ekonomi Pembangunan

Sri wahyu astuti, “*Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kecamatan Bejen kabupaten Temanggung*”,(Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang), tahun 2013

Sri Mulyati, Peran Ganda Wanita Dalam Perspektif Islam Studi Tentang Ibu-Ibu Pedagang Pasar Klewer,(Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta:2012),h.15

Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet, IV (Yogyakarta: : PT. Pustaka Pelajar)